

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN.Smg)**



### **PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : ELYNA NOOR DINA NAZLA

NIM : 127010628

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
SEMARANG**

**2017**

TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor :  
942/Pid.B/2005/PN. Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Elyna Noor Dina Nazla  
NIM : 127010628

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Mahmutarom, HR, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Suparmin, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT  
UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan No : 942/Pid.B/2005/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

**ELYNA NOOR DINA NAZLA**

**NIM : 127010628**

Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2017

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH  
NPP. 01.99.0.0005

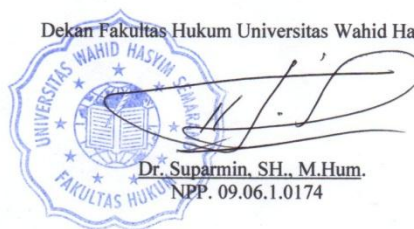
Penguji II

Dr. Suparmin, SH., M.Hum  
NPP. 09.06.1.0174

Penguji III

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH  
NPP. 09.10.1.0177

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim



Dr. Suparmin, SH., M.Hum.  
NPP. 09.06.1.0174

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama: Elyna Noor Dina Nazla  
Nim: 127010628  
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 28 Maret 1987  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Konsentrasi: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor :  
942/Pid.B/2005/PN. Smg)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian saya buat surat pernyataan ini dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, Januari 2017



Elyna Noor Dina Nazla

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 942/Pid.B/2005/PN. Smg)”**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mudzakir Ali, MA, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim;
2. Bapak Dr. Suparmin S.H.,M.H, selaku Dekan dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim;
3. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu dan Suami Penulis atas dukungan, perhatian, serta doa yang tiada henti;
5. Bapak/Ibu Tim Penguji atas kesediaan waktu dalam ujian skripsi ini, serta masukan yang berguna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang dengan perantarnya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

7. Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
8. Bapak alm. Achmad Zaid S.H, M.H selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan banyak informasi dan saran atas penanganan kasus Saudara Heru Supriyono yang menjadi objek penelitian penulis.
9. Teman-teman dekatku Sabarudin Hulu, Budiyanto, Mochamad Agus Ardyansyah, Tri Lindawati atas saran, dukungan moril dan ketersediaannya bertukar pikiran dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, 2017

Penulis

Elyna Noor Dina N.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg dengan KUHAP, mengetahui akibat hukum dari upaya hukum ganda (Banding dan Kasasi) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terbit dua putusan pengadilan serta mengetahui pelaksanaan putusan bagi para terdakwa dengan adanya Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg dan putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu dengan pendekatan studi kasus kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg, Putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008, serta bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan buku, makalah, jurnal yang mendukung data primer. Metode analisis data dimulai dengan pengumpulan data, baik data primer, maupun data sekunder, yang kemudian diinventarisasi dan diseleksi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum ganda Jaksa Penuntut Umum yaitu Banding dan Kasasi atas putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap terdakwa Sdr. Heru Supriyono dan Sdr.Yulius Basiwantoro tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP dimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum adalah Kasasi dan Kasasi demi Kepentingan Hukum. Akibat hukum dari terbitnya Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg adalah tidak berlakunya Putusan tersebut bagi terdakwa I (Drs. Sujoko) dan terdakwa II (Drs. Heru Supriyanto, M.Pd) karena terbit dengan prosedur yang tidak sesuai KUHAP, sedangkan pelaksanaan hukuman bagi para terdakwa dengan terbitnya Putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.sus/2008 yang amar Putusannya menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak Kasasi para Terdakwa, maka bagi terdakwa I dan terdakwa II yang diputus lepas dari tuntutan hukum adalah kembali kepada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 942/Pid.B/2005/PN.Smg, sedangkan untuk terdakwa III (Yulius Basiwantoro, BA) dan terdakwa IV (Untung Sudjarno, S.H) yang dijatuhi hukuman pemidanaan kembali kepada Putusan Banding Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg.

Simpulan Penelitian ini adalah bagi terdakwa I dan terdakwa II yang diputus lepas dari tuntutan hukum, maka terhadap keduanya harus dilembalikan pada harkat dan martabatnya termasuk hak-hak terdakwa serta kedudukannya. Saran Penelitian yakni Kejaksaan Negeri Semarang diharapkan segera melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 898 K/Pid.sus/2008 tanggal 3 November 2008.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Lepas dari Tuntutan Hukum**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	13
B. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	17
B.1. Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	17
B.2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana.....	20
B.3. Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas dari Tuntutan Hukum.....	25
C. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....	28
C.1. Pengertian Upaya Hukum.....	28
C.2. Bentuk-bentuk Upaya Hukum Menurut KUHAP.....	30
C.3. Upaya Hukum atas Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum.....	50



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	54
A. Metode Pendekatan.....	54
B. Spesifikasi Penelitian.....	55
C. Jenis Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	59
A. Kesesuaian Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Ketentuan KUHP.....	59
A.1. Deskripsi Kasus.....	59
A.2. Amar Putusan Pengadilan Negeri.....	62
A.3. Pembahasan.....	64
B. Akibat Hukum dari Upaya Hukum Ganda (Bandung dan Kasasi) Jaksa Penuntut Umum sehingga terbit dua putusan pengadilan.....	69
B.1. Amar Putusan Bandung.....	69
B.2. Amar Putusan Kasasi.....	70
B.3. Pembahasan.....	71
C. Pembahasan Pelaksanaan Putusan bagi Para Terdakwa dengan adanya Putusan Bandung Nomor 302/Pid/2006/PT.Smg dan Putusan Kasasi Nomor 898 K/Pid.Sus/2008.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	80